

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.

“Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak *melakukan (public policy is whatever goverments choose to do or not to do)*”.

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersenut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik.

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau

bentuk upaya-upaya lainnya bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikan.

Menurut James E. Anderson (dalam Subarsono 2013:2) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Menurut Carl J. Fedrick (dalam Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang disusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robert Eyestone (dalam Leo Agustino 2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Menurut Anderson (dalam Leo Agustino 2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

*“A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”* (kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan).

Menurut Nugroho (2016:12) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan public merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah di tempuh.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, dalam Subarsono 2013:3)

### **2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan**

Pada siklusnya, secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi, (Repley 1985, dalam Subarsono 2013:10). Kebijakan di jelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama yakni di dalamnya mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita didalam

mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yaitu tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley (1985) dalam Subarsono 2013:11 sebagai berikut:

#### **A. Tahap Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### **B. Tahap Formulasi Kebijakan**

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada

tahap-tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### **C. Tahap Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, *consensus* antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

### **D. Tahap Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah di ambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan menapat dukungan para pelaksana (implementator) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### **E. Tahap Evaluasi Kebijakan**

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## **2.2. Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1. Defenisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politik karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, (dalam Budi Winarno 2015:148) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan tau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn, dalam Budi Winarno 2014:149) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

### **2.2.2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara (Budi Winarno 2014:150) secara sempurna yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin bersifat fisik, politis, dan sebagainya.
2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
6. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
7. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

### **2.3.1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan public tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan

berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. (Budi Winarno 2014:150). Diantaranya adalah:

1. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi kebijakan publik disebabkan samarnya isi dari kebijakan itu, yaitu:

- a. Tujuan yang tidak cukup terperinci
- b. Sama-sama dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- c. Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Kurangnya informasi

Kekurangan informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksana, isi kebijakan yang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksana, isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil yang kebijakan. Struktur komunikasi antar organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka patuhi.

3. Kurangnya dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum.

#### 4. Adanya pembagian potensi

Pembagian potensi dimana aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksana, struktur dari organisasi pelaksana (pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh pembatasan-pembatasan yang kurang jelas).

#### 3.3.1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Budi Winarno 2014:177) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact an Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) Komunikasi; (ii) Sumberdaya; (iii) Disposisi; (iv) Struktur birokrasi.

Variable pertama yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, dan konsisten. Komunikasi (atau pertransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam

melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan.

Variable kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf dan sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah

yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain terikat yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang ini nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variable ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada pertunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' system

pelayanan public yang optimal , penilaian personil dalam bekerja, sehingga metode *bypassing perosnil*.

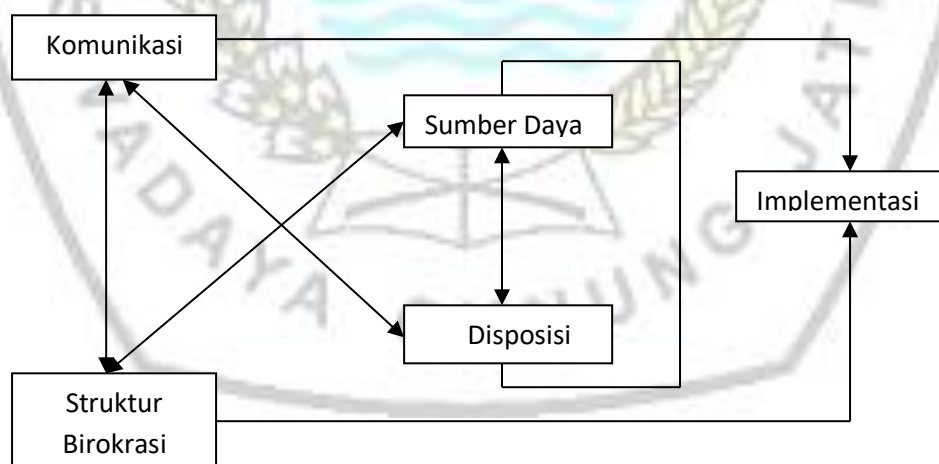
- c. Intensif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi intensif para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang mmebuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi upaya kepentingan pribadi (*self intered*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak manusia. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan membagikan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat koordinasi yang baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III , yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a. *Standard Operating Prosedures (SOP)*; adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaku kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. *Frogmentasi*; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.



**Gambar 2.1**

***Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation***

## **2.3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika**

### **2.3.1. Pengertian Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika**

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hamper setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Menurut ilmu kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standard pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur illegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat social ekonomi menengah sampai sampai tingkat sosial

ekonomi terutama pemuda. Tampaknya generasi muda adalah sasaran startegis perdagangan gelap narkoba. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Peran penting sektor kesehatan sering tidak disadari oleh petugas kesehatan itu sendiri, bahkan para pengambil keputusan, kecuali mereka yang berminat di bidang kesehatan jiwa, khususnya penyalahgunaan narkoba. Bidang ini perlu dikembangkan secara lebih professional .sehingga menjadi salah satu pilar yang kokoh dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bias saja seorang anak berasal dari keluarga yang kurang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkoba. Perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan yang terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.

Ada beberapa program yang dijalankan Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba:

**a. Desa Bersinar (Bersih dari Narkona)**

Program Desa Bersinar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba dari pinggiran karena barang itu disinyalir lebih banyak diedarkan di desa dibandingkan di kota. Program ini mengupayakan apabila ada warga masyarakat atau para remaja pecandu Narkoba agar bisa disarankan untuk segera datang langsung ke BNN dan akan diberikan perawatan dan perobatan gratis dan akan dilakukan esosmen agar bias melihat apakah yang bersangkutan akan wajib lapor atau tidak.

**b. Penggiat Anti Narkoba**

Bagian Pencegahan Narkoba BNN merekrut warga sebagai relawan penggiat anti narkoba yang bertugas di wilayahnya masing-masing, perekrutan ini merupakan upaya BNN untuk terus mengedukasi masyarakat luas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan peran aktif dari elemen masyarakat itu sendiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban, dalam “Pasal 104 dan 108 tentang peran serta masyarakat”.

**c. Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba**

Program ini bertujuan untuk bagaimana menghasilkan relawan anti narkoba di setiap instansi, relawan inilah yang nanti akan berperan menyampaikan di

lingkup instansinya tentang P4GN. Program ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perwakilan dari setiap OPD dituntut untuk bisa melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukan, sehingga bisa mencegah bahaya narkoba khususnya di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga masyarakat dan generasi muda khususnya di lingkungan masyarakat tersebut bisa berkomitmen menolak terhadap penyalahgunaan narkoba.

**d. Kampanye Medsos (Media Sosial)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya merespons tantangan pencegahan penyalahgunaan narkoba di era digital. BNN mendirikan Social Media Center atau lebih populer disebut Medsos Center. BNN memanfaatkan internet di era digital agar bisa mengcover, memonitor, dan mengevaluasi medsos yang ada di Indonesia, baik Twitter, Instagram, Facebook, maupun lainnya. Inovasi berupa Medsos Center ditargetkan bertujuan meningkatkan akses informasi dan sinergi kegiatan pencegahan melalui media online serta pengukuran kinerja kampanye. Dari sini BNN memiliki data monitoring dan analisis media sosial yang tepat sehingga segmen kampanye menjadi tepat sasaran. Konten sesuai dengan segmen, posting juga responsif, bahkan mampu 24 jam secara otomatis dibantu sistem teknologi informasi.

**e. Agen Pemulihan dan Penyuluhan**

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan program Agen Pemulihan dan Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Melalui program ini agen pemulihan nantinya akan mengajak masyarakat yang telah terpapar narkoba untuk di rehabilitasi, sedangkan penyuluh akan fokus pada kegiatan P4GN untuk mencegah timbulnya pecandu baru dan meluasnya peredaran ilegal narkotika, psikotropika, zat adiktif serta obat-obatan berbahaya lainnya (narkoba). Para penyuluh akan diberikan pelatihan mengenai P4GN, sedangkan agen pemulih akan diajarkan cara mendekati masyarakat yang terpapar, serta cara melakukan rehabilitasi awal, agar masyarakat yang terpapar ini mau direhabilitasi.

**f. Pemberantasan**

Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan aparat di tingkat kelurahan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Mulai dari masyarakat tingkat RT/RW hingga Kelurahan akan dilibatkan, termasuk Babinsa dan Babinmas ikut di kerahkan. BNN berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk melibatkan instansi terkait mengawasi, melaporkan, dan melakukan tindakan jika diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba.